



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 00/2735951

☐ Pembetulan Ke ☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1 NPWP : 255920720433000
2 NIP/ NRP : 198001102005011002
3 NAMA : Arif Hidayat Sulistya, SH.
4 PANGKAT/ GOL : III/d / Penata Tk.I
A.5 NAMA JABATAN : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
A.6 JENIS KELAMIN : ☐ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN
A.7 NIK : 3215141001800005
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K / 1

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	60.216.800
2.	TUNJANGAN ISTRI	6.021.680
3.	TUNJANGAN ANAK	1.204.336
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	12.852.000
6.	TUNJANGAN BERAS	3.041.640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	627
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	83.700.190
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	167.037.273
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	6.000.000
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.745.882
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	8.745.882
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	158.291.391
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	158.291.391
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	95.291.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	8.293.649
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	8.293.649
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	7.163.261
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	7.163.261
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	1.130.388
24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1.130.388

PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

1 NPWP Instansi Pemerintah : 000148965017000
2 Nama Instansi Pemerintah : SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
3 ID Sub Unit Organisasi : 451005
4 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
5 NAMA PENANDATANGAN : Denny Hariman Ritonga, S.Sos
6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ informasi@pajak.go.id ◆
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-42857/CT/KPP.2204/2026
Tanggal : 20 Februari 2026

NPWP : 3215141001800005
Nama Wajib Pajak : ARIF HIDAYAT SULISTYA
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 20 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.